

KONFLIK TURKI-KURDI DAN SITUASI KEAMANAN DI SURIAH PASCA-PENARIKAN PASUKAN AMERIKA SERIKAT

Simela Victor Muhamad

7

Abstrak

Situasi keamanan di Suriah pasca-penarikan pasukan Amerika Serikat (AS), yang langsung diikuti dengan operasi militer Turki terhadap milisi Kurdi di Suriah, menjadi pemberitaan media massa belakangan ini dan menimbulkan kekhawatiran internasional. Situasi keamanan di Suriah, yang dalam beberapa tahun belakangan dihadapkan pada situasi konflik antara yang pro dan kontra rezim Bashar al-Assad, dikhawatirkan akan semakin tidak stabil. Kekhawatiran itu terkait dengan isu konflik Turki dan Kurdi, dan potensi konflik lainnya. Dengan penarikan pasukan AS dari Suriah, Turki dengan leluasa dapat menyerang milisi Kurdi yang dianggapnya sebagai ancaman. Rusia, dan juga Iran, akan lebih leluasa memainkan perannya di Suriah. Situasi keamanan yang terjadi di Suriah pasca-penarikan AS tersebut menjadi fokus bahasan tulisan ini, dengan terlebih dahulu diulas penyebab terjadinya konflik Turki dan Kurdi, implikasinya dalam konteks yang lebih luas, serta bagaimana seharusnya masyarakat internasional, termasuk Indonesia, menyikapinya. Indonesia dapat berperan melalui keanggotaan di DK PBB, dan juga melalui jalur parlemen.

Pendahuluan

Situasi keamanan di Suriah pasca-penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) di Suriah dari daerah perbatasan Turki, yang sudah dimulai sejak 7 Oktober 2019 (Kompas, 8 Oktober 2019), memunculkan kekhawatiran masyarakat internasional, terutama jika dikaitkan dengan kebijakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang akan menyerang milisi Kurdi di Suriah. Kekhawatiran tersebut menjadi kenyataan setelah militer Turki, mulai 9 Oktober 2019, melakukan

serangan terhadap milisi Kurdi di Suriah (Kompas, 10 Oktober 2019).

Operasi militer terhadap milisi Kurdi di Suriah sudah lama direncanakan Turki. Pemerintahan Erdogan melihat milisi Kurdi sebagai kepanjangan Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang dinyatakan sebagai organisasi teroris oleh Turki. Rencana serangan Turki mendapat peluang setelah AS menarik mundur pasukannya dari wilayah-wilayah bakal target serangan. Sebelum mengumumkan awal serangan, Erdogan memberitahu



Presiden Rusia Vladimir Putin soal serangan itu, yang direspons Putin dengan meminta Turki untuk memikirkannya secara matang sebelum memulai serangan. Turki juga memberitahu AS soal serangan itu melalui Duta Besar AS untuk Turki (*thejakartapost.com.*, 10 Oktober 2019).

Sementara itu, pemerintah otonom Kurdi di Suriah menyebut AS harus bertanggung jawab atas bencana kemanusiaan yang ditimbulkan akibat serangan Turki. Turki berani menyerang karena AS sudah menarik pasukan dari wilayah Suriah di perbatasan Turki yang menjadi basis milisi Kurdi. (*theguardian.com.*, 10 Oktober 2019). Sebelumnya, tentara AS adalah penasihat Pasukan Demokratik Suriah (*Syrian Democratic Forces/SDF*) yang mayoritas beranggotakan milisi Kurdi. SDF berkoalisi dengan AS selama perang melawan milisi Negara Islam di Irak dan Suriah (*Islamic State of Iraq and Syria/ISIS*). Sekarang situasinya berbeda, setelah AS meninggalkan Suriah dan milisi Kurdi berada dalam posisi sulit di tengah gempuran Turki, SDF memilih bekerja sama dengan rezim Suriah Bashar al-Assad (yang sebelumnya diperangi SDF dengan dukungan AS) untuk menghadapi Turki.

Situasi yang terjadi di Suriah pasca-penarikan pasukan AS, khususnya konflik antara Turki dan milisi Kurdi, menjadi pemberitaan media massa hingga saat ini. Oleh karena itu, menarik untuk dibahas kemudian, mengapa terjadi konflik antara Turki dan milisi Kurdi di Suriah, dan bagaimana situasi keamanan di

Suriah pasca-penarikan pasukan AS? Hal tersebut akan dibahas secara singkat melalui tulisan ini, termasuk sikap yang perlu diambil oleh masyarakat internasional terhadap situasi yang terjadi di Suriah tersebut.

Konflik Turki-Kurdi

Operasi militer yang dilakukan Turki terhadap milisi Kurdi di Suriah pasca-penarikan pasukan AS tidak muncul begitu saja, bahkan sudah direncanakan sebelumnya oleh Recep Tayyip Erdogan. Hal tersebut seakan menunjukkan bahwa konflik antara Turki dan Kurdi sulit untuk dielakkan, bahkan semakin menjadi. Hal tersebut terlihat antara lain dari pengerahan pasukan Turki ke perbatasan Suriah, khususnya Suriah timur laut yang dikuasai suku Kurdi. Pengerahan pasukan Turki tersebut ditujukan untuk memerangi milisi Kurdi yang dianggap Erdogan sebagai teroris dan secara faktual mengendalikan perbatasan Suriah-Turki. Erdogan berkeinginan membuat zona penyangga selebar 30 kilometer di perbatasan Suriah-Turki, yang nantinya akan dipakai untuk menempatkan 2 juta dari 3,6 juta pengungsi Suriah yang kini berada di Turki (Kompas, 15 Oktober 2019).

Perlu dipahami di sini adalah bahwa terjadinya konflik antara Turki dan Kurdi di Suriah tidak dapat dilepaskan dari keterkaitannya dengan isu Kurdi yang sudah muncul sejak awal Republik Turki pada 1923. Orang-orang Kurdi dipandang sebagai ancaman bagi Republik Turki (Gunez, 2016: 97-102). Singkatnya, kelompok etnis Kurdi yang

populasinya terus bertambah dan sebagian besar menghuni suatu daerah yang dikenal sebagai Kurdistan, meliputi bagian yang berdekatan dengan Iran, Irak, Suriah, dan Turki, menuntut hak politik untuk membentuk negara sendiri. Gerakan perlawanan Kurdi akhirnya lahir, yang terkuat adalah Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Turki. PKK didirikan oleh Abdullah Ocalan pada 1978, dengan tujuan mendirikan negara Kurdi di sebelah tenggara Turki dan menyatukan seluruh orang Kurdi yang tersebar di beberapa negara sekitar.

Kehadiran PKK yang bisa mengancam integritas Turki ditentang oleh otoritas Turki, dan oleh karenanya, konflik pun tidak terhindarkan antara Turki dan Kurdi hingga saat ini, termasuk di Suriah. Dalam konflik tersebut, tentara Turki juga berhadapan dengan SDF, kelompok pejuang Kurdi yang oleh rezim Erdogan dianggap sebagai bagian dari PKK, yang selama tiga dekade bertempur melawan militer Turki. Konflik tersebut juga terlihat belakangan ini di perbatasan Suriah pasca penarikan pasukan AS. Dalam konflik ini, SDF “terpaksa” harus bekerja sama dengan pemerintahan Bashar al-Assad untuk menghadapi Turki. Pemerintahan Bashar al-Assad bisa menerima kerja sama ini, karena ia juga khawatir dengan Turki yang bisa mengancam kekuasaannya.

Dari ulasan singkat terkait konflik Turki dan Kurdi ini, setidaknya bisa dipahami bahwa konflik tersebut terjadi dikarenakan kekhawatiran Turki terhadap keberadaan milisi Kurdi di Suriah yang bisa mengancam

kepentingan Turki untuk bisa mengontrol perbatasannya dengan Suriah, sehingga milisi Kurdi perlu disingkirkan. Namun, pada saat yang bersamaan, milisi Kurdi tidak bisa menerima langkah Turki tersebut, dan oleh karenanya, konflik Turki dan Kurdi di Suriah pun tidak terhindarkan.

Potensi Konflik Yang Lebih Luas

Situasi yang terjadi di Suriah pasca-penarikan pasukan AS, yang ditandai dengan terjadinya konflik antara Turki dan Kurdi, perlu dilihat juga dalam konteks yang lebih luas. Situasi keamanan di Suriah yang selama ini belum stabil dan kondusif dikhawatirkan akan semakin terpuruk, karena berbagai kepentingan dan kekuatan, baik aktor negara maupun non-negara (*non-state actor*) bisa saja memanfaatkan situasi ini. Untuk aktor negara, meskipun Turki sejauh ini membatasi keterlibatannya di Suriah sebatas memerangi milisi Kurdi, namun perlu juga diantisipasi kemungkinan lain, yaitu konflik antara Turki dan Suriah. Konflik Turki-Suriah sangat potensial terjadi, terutama jika pemimpin di kedua negara ini, yang memang berseberangan dalam sikap politiknya, mengambil langkah-langkah militer untuk merespons persoalan yang berkaitan dengan kepentingan mereka.

Yang lebih dikhawatirkan lagi, kekuatan-kekuatan luar, terutama negara-negara besar di kawasan maupun non-kawasan Timur Tengah yang memiliki kepentingan, juga ikut terlibat dalam urusan yang terjadi di

Suriah. Bagi pemerhati hubungan internasional, sudah bukan rahasia lagi bahwa Suriah menjadi ajang *proxy war* bagi kekuatan-kekuatan besar yang memiliki kepentingan di Timur Tengah (Alhadar, 2019). Selain Turki, negara-negara lain yang berkepentingan dengan Suriah, adalah Iran, Rusia, AS, dan juga Arab Saudi. Negara-negara tersebut, dengan berbagai kepentingannya, memiliki agenda yang ingin diperjuangkan di Suriah, baik itu terkait dengan kepentingan keamanan mereka di kawasan, maupun kepentingan strategis lainnya, antara lain persaingan ideologi (terutama Iran dan Arab Saudi). Kekhawatiran bagi terjadinya konflik di Suriah yang lebih kompleks pasca-penarikan pasukan AS ini sudah seharusnya diantisipasi oleh masyarakat internasional.

Satu hal yang juga perlu diantisipasi adalah kembalinya kekuatan ISIS di Suriah. Di tengah gempuran Turki ke wilayah Suriah belakangan ini, milisi ISIS mencoba melepaskan rekan-rekannya yang ditahan. Organisasi Pemantau Hak Asasi Manusia Suriah (SOHR) menyebut, tiga milisi ISIS menyerang pos Pasukan Demokratik Suriah (SDF). Serangan di Raqqa, kota yang pernah menjadi ibu kota ISIS di Suriah itu, melibatkan baku-tembak dan pengeboman. SOHR menyebut dua di antara tiga milisi ISIS itu meledakkan diri. ISIS mengklaim 13 milisi SDF jadi korban serangan itu (Kompas, 11 Oktober 2019). Dalam pernyataan pada September 2019, Pemimpin ISIS Abu Bakar al-Baghdadi mendorong para milisi ISIS untuk meningkatkan upaya

membebasikan rekan-rekannya. SOHR dan SDF menyebut, serangan udara Turki pasca-penarikan pasukan AS menasar penjara Chirkin di Qamishli, Suriah, yang terdapat milisi dan pendukung ISIS dari 60 negara. SDF menyebut serangan udara Turki itu sebagai percobaan membantu para milisi ISIS melarikan diri (Kompas, *Ibid*).

Keterlibatan kekuatan-kekuatan eskternal Suriah, baik aktor negara maupun non-negara (semacam ISIS), dengan agenda dan kepentingan masing-masing bisa memperkeruh situasi konflik di Suriah. Rusia, dan juga Iran, yang memiliki kepentingan di Suriah, akan lebih leluasa memainkan perannya, dan hal tersebut bukan tidak mungkin akan mendapat respons negatif dari pihak-pihak tertentu yang tidak menyukainya. Potensi konflik yang lebih luas dan kompleks ini harus diantisipasi oleh masyarakat internasional, termasuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sikap yang Harus Diambil Masyarakat Internasional

Masyarakat internasional tidak boleh membiarkan situasi di Suriah pasca-penarikan pasukan AS menjadi lebih buruk dari sisi keamanan. Meskipun AS memiliki alasan sendiri untuk menarik pasukannya dari Suriah, terutama setelah mengalahkan ISIS dan karena faktor keamanan tentara AS, fakta di lapangan menunjukkan bahwa situasi keamanan di Suriah masih rentan. Konflik Turki dan Kurdi, dengan berbagai implikasinya, serta potensi konflik yang lebih luas sebagaimana

dikemukakan di atas, tidak dapat diabaikan begitu saja.

Untuk konflik Turki dan Kurdi, masyarakat internasional bisa saja mendorong dan berharap bahwa hal tersebut dapat diatasi secara langsung oleh mereka melalui dialog. Namun, jika memerhatikan perkembangan berita terakhir, setidaknya hingga 16 Oktober 2019, jalan dialog sepertinya belum menjadi opsi, khususnya oleh Turki. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, misalnya, menolak proposal presiden AS Donald Trump untuk melakukan pembicaraan gencatan senjata dengan Kurdi Suriah, tetapi ia setuju untuk terus berdialog dengan AS (*sindonews.com.*, 16 Oktober 2019). Ini artinya, meskipun saluran dialog secara langsung antar-pihak yang berkonflik masih tertutup, ternyata masih ada peluang untuk menyelesaikan konflik Turki-Kurdi secara damai melalui keterlibatan pihak ketiga.

Keterlibatan masyarakat internasional yang lebih luas, termasuk melalui PBB, mungkin saja dilakukan jika konflik Turki dan Kurdi menimbulkan implikasi terhadap stabilitas keamanan dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Dalam konteks ini, Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, dapat berkontribusi untuk mencari solusi damainya. Kontribusi Indonesia dapat juga dilakukan melalui jalur parlemen, khususnya melalui forum *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, dengan menyuarakan pentingnya upaya perdamaian dilakukan di Suriah. Antisipasi masyarakat internasional juga perlu

dilakukan untuk mencegah gerakan ISIS kembali bangkit di Suriah. Sementara itu, perlindungan internasional terhadap kelompok etnis Kurdi yang tidak bersalah juga perlu dilakukan.

Penutup

Kepentingan Turki untuk mengamankan wilayah perbatasannya dengan Suriah dari milisi Kurdi, yang dianggap Turki sebagai gerakan perlawanan dan teroris, dan sikap milisi Kurdi yang tidak mau ditekan oleh Turki, telah menyebabkan terjadinya konflik antara Turki dan Kurdi. Operasi militer Turki terhadap milisi Kurdi di Suriah pasca-penarikan pasukan AS telah menjadi keprihatinan internasional karena dikhawatirkan dapat memicu konflik yang lebih luas dan kompleks di Suriah, baik itu terkait dengan kepentingan aktor negara maupun non-negara. Oleh karena itu, masyarakat internasional perlu mengantisipasi hal tersebut, terlebih ketika konflik-konflik yang terjadi di Suriah, khususnya antara Turki dan Kurdi sulit diupayakan melalui dialog. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, baik melalui jalur diplomasi pemerintah maupun parlemen, perlu berkontribusi dalam mencari solusi atas persoalan yang terjadi di Suriah.

Referensi

- "Alhadar, Smith. (2019). "Proxy War dan Kontestasi Negara-negara Timur Tengah", *Makalah FGD di Puslit BK DPR-RI*, 11 September 2019.
- "AS Pilih Keluar dari Suriah", *Kompas*, 8 Oktober 2019, hal. 8.
- "Battlefield brethren torn apart", *The New York Times*, 15

Oktober, hal. 1 & 6.
Gunes, Cengiz. (2016). "Kurdish Political Activism in Turkey: An Overview", dalam Michael M. Gunter (ed), *Kurdish Issues*, Mazda Publishers, hal. 97-102.
"NIIS Manfaatkan Serangan Turki", *Kompas*, 11 Oktober 2019, hal. 8.
"Turki Gempur Suriah Utara", *Kompas*, 10 Oktober 2019, hal. 4.
"Turkey launches ground offensive against Kurdish forces in Syria", <https://www.thejakartapost.com/news/2019/10/10/turkey-launches-ground-offensive-against-kurdish-forces-in-syria.html>, diakses 15 Oktober 2019.

"Turkish troops advance into Syria as Trump washes hands of the Kurds", <https://www.theguardian.com/world/2019/oct/09/turkey-syria-attack-latest-news-kurds-trump>, diakses 15 Oktober 2019.

"Turki Tolak Proposal AS soal Dialog dengan Kurdi", 16 Oktober 2019, <https://international.sindonews.com/read/1449305/43/turki-tolak-proposal-as-soal-dialog-dengan-kurdi-1571224344>, diakses 17 Oktober 2019.



Simela Victor Muhamad
simela.muhamad@dpr.go.id

Drs. Simela Victor Muhamad, M.Si. adalah Peneliti Ahli Utama Bidang Isu-isu Politik Strategis, Masalah Internasional dan Domestik pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian (Puslit BKD) DPR RI. Aktif sebagai peneliti pada Puslit BKD DPR RI, yang bertugas memberikan dukungan substansi terkait isu-isu hubungan internasional kepada Anggota DPR RI. Beberapa Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain "Kepentingan Maritim China da Kawasan Respons Indonesia." (bagian dari buku Agenda Poros Maritim, Penerbit Azza Grafika, 2015); "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba ke Indonesia: Masalah dan Upaya Penanganannya" (bagian dari buku Aktor Non-Negara: Kajian Implikasi Kejahatan Transnasional di Asia Tenggara, Penerbit Yayasan Obor, Indonesia, 2017); "Isu Keamanan Semenanjung Korea dan Upaya Damai Parlemen." (artikel di Jurnal Politica Vol 7 No. 1, Mei 2016) dan "Peran Asian Parliamentary Assembly dalam Mendukung Solusi Damai Palestina-Israel" (artikel di Jurnal Politica, Vol. 8 No. 1, Mei 2017)

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.